

**DAFTAR PUSTAKA**

**Kelompok Literatur :**

- Abdullah, Rozali *Hukum Kepegawaian* Pt. Raja Grafindo Persada Jakarta, 1996,
- Algra, N.E., dkk. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Penerbit Bina Cipta Jakarta, 1983;
- Baut, Paul S. dan Beny Herman K., *Kompilasi Deklarasi HAM*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988;
- C. de Rover, *To Serve & To Protect*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2000;
- Djalal, Dino Patti, *Penyelesaian Masalah Timor Timur Dalam Lintasan Sejarah*, ICWA, Jakarta, 1999.
- Djatmiko, Sastra dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia* Penerbit Djambatan, 1987.
- Gani, Abdoel, Hubungan Antara Politik, Hak Asasidan Pembangunan Hukum Indonesia, *Makalah* Disampaikan pada Dies Natalis XL/Lustrum VIII Universitas Airlangga Surabaya, 1994;
- Gautama, Sudargo, *Warga Negara dan Orang Aslug*, Penerbit Alumni, Bandung 1997
- George Clack , Katleen Hug, *Introduction of Human Rights*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998;
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987;
- \_\_\_\_\_ *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* Gadjah Mada University Press, 1997;
- Hasibuan, Albert, HAM dalam Sistem Hukum Indonesia, *Kertas Kerja* untuk Simposium Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1994;
- Ian Brownlie, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*;
- IG. Wursanto, *Manajemen Kepegawaian 2*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1989;
- Prinst, Darwan, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001;

- Saksono, Slamet., *Administrasi Kepegawaian*, Penerbit Kanisius Yogyakarta, 1989.
- Setia Tunggal, Hadi, *Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia*, Harvarindo, 2000;
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Manusia Dasar Kenegaraan Modern*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Tayibnapis, A. Burhanudin, *Administrasi Kepegawaian Suatu Tinjauan Analitik*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995;
- Analisa, Satu Dasawarsa Timor Timur, CSIS, 1986

**Kelompok Aturan Hukum :**

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/1978 tentang *Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang *Hak Asasi Manusia*;
- Ketetapan MPR RI No.V/MPR/1999 tentang *Penentuan Pendapat di Timor Timur*.
- Undang-Undang No.11 Tahun 1969 tentang *Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai*;
- Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1976 tentang *Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur*;
- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang *Perubahan Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*;
- Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1975 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1991 tentang *Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS*;
- Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1976 tentang *Pemerintahan Propinsi Daerah Tk.I Timor Timur dan Kabupaten-Kabupaten Daerah Tk. II di Timor Timur*;

Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1979 tentang *Pengangkatan Pegawai Yang Bekerja Pada Pemerintah Propinsi Daerah Tk.I Timor Timur Menjadi Pegawai Negeri*

Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1994 tentang *Pemberhentian PNS.*

Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1986 tentang *Pemberian Tunjangan Penghargaan /Santunan Janda/Duda Bekas Pegawai Pemerintah Sementara Timor Timur/Pensiunan Bekas Pegawai Pemerintah Kolonial Portugis Timor Timur;*

Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1989 tentang *Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pemberian Pensiun Janda/Duda;*

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2001 tentang *Pemberhentian Pegawai Negeri dan Pembatalan SK, Pensiun Pegawai Negeri pada Bekas Propinsi Timor Timur;*

Keputusan Presiden No.12 Tahun 1979 yang dirubah dengan Keputusan Presiden No.32 Tahun 1985 tentang *Tunjangan Khusus Timor Timur;*

Keputusan Presiden No.2 Tahun Yo Keputusan Presiden No.11 Tahun 1983 tentang *Pengangkatan Pejabat dan Tenaga Honorer Yang Bekerja Pada Pemerintahan Daerah Tk. I Timor Timur menjadi Pegawai Negeri Sipil;*

Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1984 tentang *Pengangkatan Pegawai, Pegawai Harian, Pegawai Bulanan, Tentara dan Polisi Bekas Pemerintahan Koloni Timor Portugis menjadi Pegawai Negeri Sipil;*

Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1993 tentang *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;*

*Decreto Lei* No. 498 Tahun 1972.